

YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

EVALUASI YAYASAN TANAH MERDEKA (YTM) TAHUN 2023: KARUT-MARUT PERTAMBANGAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN NIKEL DI SULAWESI TENGAH

I. Ringkasan Eksekutif

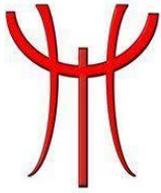
Sulawesi Tengah adalah provinsi utama penambangan bijih nikel dan industri pengolahan nikel di Indonesia. Pada tahun 2023, total luas areal izin pertambangan nikel di Sulawesi Tengah mencapai 299.185 hektar yang dikuasai oleh 121 badan usaha. Ada 53 perusahaan memegang izin usaha industri pengolahan logam berbasis nikel di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023, industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah memiliki kapasitas produksi terpasang mencapai 668.000 ton kandungan logam nikel pertahun.

Mempekerjakan lebih 100.000 pekerja, sayangnya standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang buruk menjadi masalah utama pertambangan dan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah. Sepanjang tahun 2023, terjadi 10 kasus terkait keselamatan di tempat kerja yang menewaskan 36 pekerja dan mencederai 47 buruh. 10 pekerja asal Tiongkok termasuk di antara 34 pekerja yang tewas.

Yayasan Tanah Merdeka (YTM) berpendapat bahwa pemerintah harus memaksa perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dengan para pekerja dan serikat-serikat buruh untuk melakukan analisa bahaya dan penilaian resiko di setiap divisi untuk memastikan bahaya-bahaya di tempat kerja dapat teridentifikasi secara jelas dan mempertahankan standar kontrol resiko yang tinggi. Tungku-tungku smelter tidak dibolehkan terus dioperasikan melampaui usia operasinya.

Ekspansi pertambangan dan industri pengolahan nikel tanpa kendali menimbulkan masalah lingkungan yang luas. Deforestasi telah mengakibatkan banjir tahunan di Morowali dan Morowali Utara. Sepanjang tahun 2023, 4 peristiwa banjir berdampak terhadap sekitar 2.000 kepala keluarga. Memilik PLTU *captive power* sekitar 5.000 MW, industri nikel di Sulawesi Tengah menjadi sumber polusi paling serius.

YTM berpendapat bahwa pemerintah mesti melakukan penegakan hukum tegas terhadap para pelaku ilegal mining dan meninjau kembali izin-izin penambangan di kawasan-kawasan hutan. Pemerintah juga harus memaksakan pelaku industri pengolahan nikel untuk segera melakukan program dekarbonisasi melalui transisi dari penggunaan PLTU batubara



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

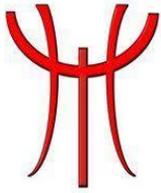
menuju penggunaan pembangkit-pembangkit listrik yang ramah lingkungan di smelter-smelter nikel yang sedang beroperasi dengan timeline tertentu. Pemerintah tidak boleh lagi mengizinkan pembangunan smelter-smelter nikel baru dan PLTU batubara baru.

Pertambangan nikel dan industri pengolahan nikel juga memicu konflik-konflik tidak terselesaikan dengan penduduk setempat. Sepanjang 2023, ada 9 kasus protes yang melibatkan tidak kurang dari 1.000 warga karena penambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara.

YTM berpendapat bahwa pemerintah mesti meninjau kembali semua IUP nikel dan kawasan-kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara yang memiliki riwayat tumpang tindih dengan lahan-lahan pertanian yang secara tradisional dikuasai penduduk setempat.

II. Perkembangan Industri Nikel

- [1] Sulawesi Tengah adalah provinsi utama penambangan bijih nikel di Indonesia. Pada tahun 2023, total luas areal izin pertambangan nikel di Sulawesi Tengah mencapai 299.185 hektar atau sekitar 4,8 persen dari total luas daratan provinsi tersebut. Dari luasan tersebut, 276.486 hektar adalah izin usaha pertambangan (IUP) dan 22.699 hektar adalah kontrak karya (KK). Terdapat 120 badan usaha pemegang IUP nikel, di antaranya 59 pemegang IUP beraktivitas di Kabupaten Morowali, 39 pemegang IUP beroperasi di Kabupaten Morowali Utara, 21 pemegang IUP berada di Kabupaten Banggai, dan 1 pemegang IUP berlokasi di Kabupaten Tojo Una-una. Terdapat sebuah pemegang KK di Kabupaten Morowali.
- [2] Sulawesi Tengah adalah salah satu pusat industri pengolahan nikel di Indonesia. Terdapat 53 perusahaan pemegang izin usaha industri (IUI) pengolahan nikel. 45 pemegang IUI beroperasi di 4 kawasan industri pengolahan nikel di Morowali dan 8 pemegang IUI beroperasi di Kabupaten Morowali Utara. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Stardust Estate Investment (SEI)/Gunbuster Nickel Industry (GNI), Transon Bumi Resources, Anugrah Tambang Indonesia (dalam konstruksi), dan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)/Baoshuo Taman Industri Investment (BTIIG) (dalam konstruksi). Selain itu terdapat Wanxiang Nickel Indonesia.



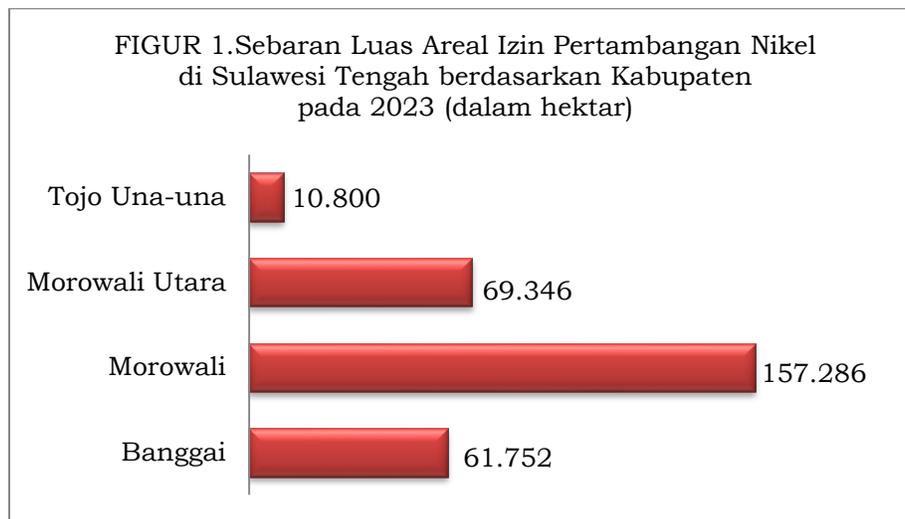
YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

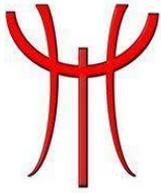


Sumber: Diolah dari ESDM

- [3] Pengolahan nikel di Sulawesi Tengah telah menghasilkan produk-produk nikel setengah jadi seperti *nickel pig iron* (NPI), *nickel matte*, dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP). NPI adalah bahan baku pembuatan *stainless steel*, sementara *nickel matte* dan MHP dapat diolah lebih lanjut sebagai bahan baku pembuatan katoda baterai kendaraan listrik.

Industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah menggunakan 2 teknologi utama. *Pertama*, teknologi *rotary-kiln electric furnace* (RKEF) yang menghasilkan NPI dan *nickel matte*. Pada 2023, terdapat 73-lini RKEF di dua kawasan industri di Sulawesi Tengah yang sudah beroperasi (Lihat FIGUR 2) dengan kapasitas produksi 668.000 ton kandungan logam nikel pertahun. *Kedua*, teknologi *high pressure acid leaching* (HPAL) yang menghasilkan MHP. Pada 2023, di IMIP diperkirakan telah memiliki fasilitas HPAL dengan kapasitas produksi 100.000 ton MHP pertahun.

- [4] Semua industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah menggunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara *captive power* sebagai sumber energi listrik. Pada 2023, total kapasitas terpasang PLTU *captive power* industri nikel di Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai 5.175 megawat (MW): IMIP (4.000 MW), SEI (945 MW), Wanxiang Nickel Indonesia (130 MW), dan PT Transon (100 MW). Pembangunan PLTU *captive power* di IHIP/BTIIG dengan kapasitas 350 MW sudah hampir rampung pada Desember 2023.



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

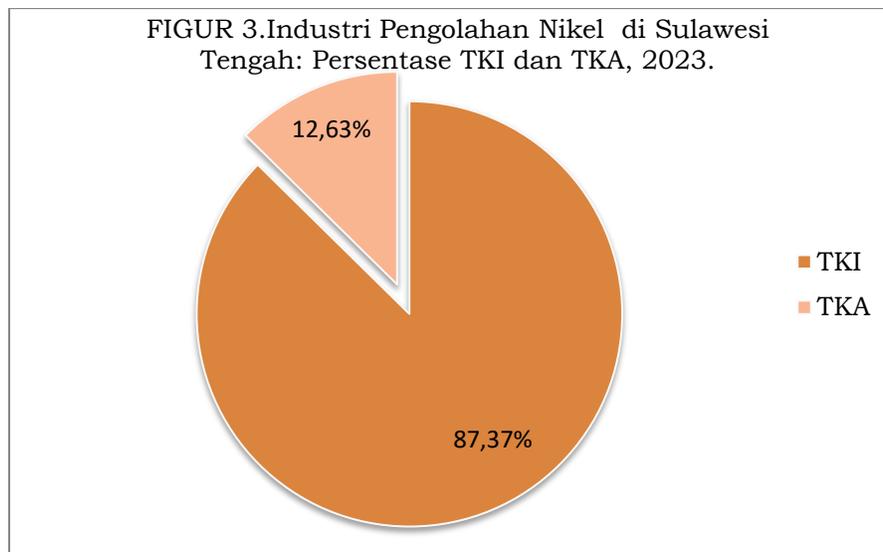
e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

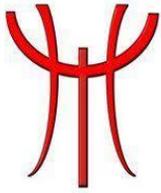


Sumber: Diolah dari data perusahaan

- [5] Pada 2023, industri nikel di Sulawesi Tengah mempekerjakan lebih dari 100.000 pekerja. Sekitar 76.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 11.600 tenaga kerja asing (TKA) berkebangsaan Tiongkok bekerja di IMIP; sekitar 11.000 buruh berkebangsaan Indonesia dan 1.300 buruh berkebangsaan Tiongkok bekerja di GNI. Sekitar 3.000 berkebangsaan Indonesia dan sekitar 100 berkebangsaan Tiongkok Wanxiang. Tidak ada data resmi yang bisa dikumpulkan tentang jumlah buruh yang bekerja di Transon. Tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah pekerja di Wanxiang.



Sumber: Diolah dari data perusahaan-perusahaan



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

III. Perburuhan, Lingkungan Hidup, dan Sengketa-Sengketa Sosial

Perkembangan pertambangan dan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah yang sangat cepat berjalan seiring dengan perluasan masalah-masalah yang tidak terselesaikan di bidang perburuhan, lingkungan hidup, dan sengketa-sengketa sosial.

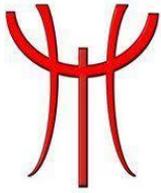
[1] Perburuhan

Standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang buruk masih menjadi masalah utama pertambangan dan industri nikel di Sulawesi Tengah. Sepanjang tahun 2023, terjadi 10 kasus terkait keselamatan di tempat kerja penting yang menewaskan 36 pekerja dan mencederai 47 buruh. 10 pekerja asal Tiongkok termasuk di antara 36 pekerja yang tewas (Lihat TABEL 1). Seperti tahun-tahun sebelumnya, buruh-buruh menghadapi resiko-resiko kecelakaan ketika mengoperasikan dump truck, dozer, excavator, kendaraan-kendaraan berat lain, dan longsor dinding-dinding tambang. Bekerja di areal smelter, buruh-buruh menghadapi resiko-resiko panas dari *furnace* (1400–1600°C), terpapar logam panas, kebakaran dan ledakan, pergerakan kendaraan-kendaraan berat, terpapar bahan-bahan kimia, jatuh dari ketinggian, dsb.

TABEL 1. Kecelakaan Kerja di Pertambangan dan Industri Pengolahan Nikel di Sulawesi Tengah pada 2023.

Tanggal	Peristiwa kecelakaan kerja	Tewas	Cedera	Lokasi
30/12	Buruh PT Permata Sumber Mineral tertimbun longsor di areal tambang	2	0	Desa Peboa
24/12	Buruh PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel terbakar ledakan smelter	21	38	IMIP
26/10	Buruh GNI tertabrak dump truck	1	0	SEI
27/9	Buruh GNI tersembur api slag	1	0	SEI
27/6	Buruh GNI tersembur api di areal smelter	1	6	SEI
28/4	Buruh Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Steel Industry tertimbun lonsor di area slag.	2	0	IMIP
15/3	Buruh PT Total Prima Indonesia tertimbun longsor di areal tambang	4	0	Desa Tangofa
8/3	Buruh GNI tatuh dari ketinggian	1	0	SEI
29/1	Buruh Dump truck GNI tergelincir di hauling PT DBM	1	0	SEI
14/1	Kekerasan menyusul protes buruh di GNI	2	3	SEI
TOTAL		36	47	

Sumber: database YTM



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

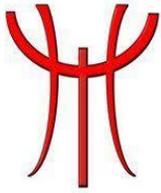
Standar K3 buruk, upah rendah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tekanan terhadap kebebasan berserikat adalah sumber-sumber sengketa hubungan industrial di kawasan industri nikel di Morowali dan Morowali Utara. Sepanjang 2023, para pekerja dan serikat-serikat buruh memobilisasi aksi-aksi protes dan pemogokan terkait isu-isu tersebut. Peristiwa paling memilukan terjadi 14 Januari 2023 ketika protes dan pemogokan sah buruh-buruh yang diorganisir Serikat Pekerja Nasional (SPN) di GNI berujung kekerasan yang menewaskan 1 pekerja Indonesia dan 1 pekerja Tiongkok. Puluhan buruh ditangkap dan 17 buruh yang ambil bagian dalam aksi tersebut dikriminalisasi, termasuk dua aktivis Serikat Pekerja Nasional (SPN), dengan tuduhan tindak pidana provokasi dan tindak kekerasan.

Berbeda dengan buruh-buruh Indonesia yang bisa melakukan protes-protes kolektif, buruh-buruh asal Tiongkok mengalami nasib buruk. Mereka tidak bisa bersuara. Tahun lalu, beberapa buruh Tiongkok melaporkan ke AMAR Law Firm & Public Interest Law Office di Jakarta tentang penderitaan yang mereka alami di IMIP. Para buruh tersebut mengeluh tentang gangguan pernafasan, hilang ingatan, detak jantung cepat, karena pencemaran di areal smelter. Mereka dipaksa bekerja 12 jam lebih setiap hari, tanpa hari libur dan hari istirahat, sementara paspor mereka ditahan. Mereka juga menghadapi denda pemotongan gaji yang berlebihan karena kesalahan kecil dalam bekerja.

[2] Lingkungan hidup

Selain penambangan bijih nikel secara legal, di Morowali dan Morowali Utara merajalela penambangan ilegal. Praktiknya melalui penambangan lahan koridor (pelakor), penambangan di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), jual beli rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB), dan jual beli bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh para penambang. Pada 2023, praktik tambang ilegal nikel terus terjadi sehingga memperburuk kerusakan lingkungan hidup.

Metode penambangan nikel secara terbuka (*open pit mining*) berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Dampak-dampak meliputi pencemaran udara, air, dan kehilangan biodiversitas terutama karena deforestasi. Deforestasi secara langsung mengakibatkan banjir tahunan di Morowali dan Morowali Utara. Sepanjang tahun 2023, ada 4 peristiwa banjir penting. *Pertama*, minggu pertama April 2023, banjir meredam 5 desa (Ulula'a, Togo, Sampalowo, Moleono dan Onepute) di Kecamatan Petasia Barat dan 2 desa (Tompira dan Bunta) di Kecamatan



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

Petasia Timur dan berdampak terhadap 1.957 kepala keluarga (KK). Banjir merendam puluhan rumah sehingga memaksa 73 KK mengungsi. Banjir juga menerjang 143 hektar kebun milik warga, 22 fasilitas umum (rumah ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintah).

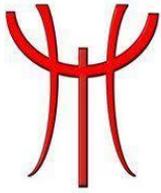
Kedua, 4 April banjir dengan ketinggian hingga 50 sentimeter melanda pusat Kota Kolonodale, ibukota Morowali Utara. Akibatnya, merendam pemukiman dan kantor perbankan di sekitar pelabuhan Kolonodale terendam. Warga kota menuduh PT Mulia Pacific Resources, anak usaha PT Central Omega Resources TBK, yang menambang di pegunungan di belakang kota sebagai penyebab banjir. Karena desakan warga, 11 April perusahaan tersebut sepakat menghentikan penambangan di Gunung Tondu setelah rapat dengar pendapat dengan DPRD Morowali Utara.

Ketiga, minggu ketiga April 2023, banjir menerjang Desa Bahumakmur dan Desa Labota di Kecamatan Bahudopi, Kabupaten Morowali. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter. Lumpur yang terbawa banjir menggenangi Dusun 4 dan 5 di Bahomakmur dan merendam 30 unit kos. Banjir juga menghantam sebagian areal PT IMIP yang berada di sekitar kedua desa tersebut.

Keempat, 26 April 2023, banjir merendam 200 rumah di Desa Korololama, Korololaki, Koromatantu, dan Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia. Warga dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Kolonodale mengklaim banjir tersebut disebabkan oleh aktivitas pertambangan nikel yang berlangsung besar-besaran di kawasan hutan pegunungan.

Pertumbuhan cepat industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah bertumpu pada pembakaran energi fosil yang kotor. Operasi PLTU batubara dengan kapasitas terpasang sekitar 5.175 MW di kawasan-kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah menimbulkan pencemaran udara: sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), partikulat (PM), dan merkuri (Hg) yang membahayakan kesehatan buruh dan warga yang tinggal di sekitar area industri. Sejak bertahun-tahun mempersoalkan pencemaran udara, 11 Oktober 2023, warga Desa Fatufia – lokasi IMIP – yang tergabung dalam Aliansi Fatufia Bersatu (AFB) melakukan aksi protes di hauling kawasan industri tersebut. Peserta yang didominasi ibu-ibu tersebut mempersoalkan debu batubara yang bersumber dari IMIP.

[3] Sengketa dengan penduduk setempat



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

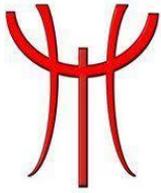
website : <http://www.ytm.or.id>

TABEL 2. Protes Terkait Penambangan Nikel di Morowali dan Morowali Utara, 2023.

Tanggal	Rangkaian protes warga
22-23/12	Sekitar 200 warga desa Tandaoleo dan Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir, Morowali, menggelar aksi protes pendudukan hauling pertambangan PT Hengjaya Mineralindo. Mereka meminta perusahaan membayar ganti rugi tanaman kepada 143 pemilik lahan.
11/10	Sekitar 200 warga desa Fatufia melakukan aksi protes di IMIP. Mereka menyoal debu batubara dari IMIP.
13/9	Sekitar 50 warga desa-desa Topogaro, Tondo, dan Ambunu di Kecamatan Bungku Barat, Morowali memblokir jalan di IHIP/BTIIG. Mereka memprotes gangguan debu, pembangunan jalan yang merendamkan 36 hektar sawah, dan reklamasi pantai yang merusak sekitar 30 hektar hutan mangrove.
Minggu I /8	Warga desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara memasang barikade di jalan PT Bumanik karena banjir lumpur sering menghantam desa tersebut di musim hujan. Di hulu desa tersebut beroperasi perusahaan tambang PT Bumanik dan PT Keinz Ventura
18/7	Sekitar 300 warga dari 13 desa dan 6 kelurahan di Kecamatan Bungku Tengah yang tergabung dalam Aliansi TepeAsa Moroso melakukan aksi protes di kantor Bupati Morowali. Mereka mendesak pemerintah mencabut IUP yang sudah terbit di Bungku Tengah. Alasannya, Bungku Tengah adalah wilayah administratif sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali, dan bukan wilayah pertambangan.
4/5	Sekitar 20 warga desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Morowali Utara memprotes kerusakan jalan karena lalu lalang kendaraan berat perusahaan-perusahaan tambang seperti PT. Hoffment, CV. Rezky Utama, PT. Trinusa Dharma Utama, PT. Sumber Permata Selaras, PT. Sumber Swarna Pratama, dan PT. Mulia Pasific Resources.
21/3	Sekitar 100 warga Desa Lalampu, Kecamatan Bahudopi, Morowali melakukan aksi protes di kantor PT Ang and Fang Brother di desa tersebut. Mereka menuntut perusahaan memberi dana CSR, penggunaan tenaga kerja dan kontraktor lokal, dan melibatkan kontraktor desa dalam kegiatan penambangan.
6/2	Sekitar 120 warga desa yang tergabung dalam Perjuangan Rakyat Tertindas (PRT) dan Aliansi Rakyat dan Buruh Bersatu (Arus) Morowali melakukan aksi protes di kantor PT Cahaya Ginda Ginda dan PT Graha Mining Utama. Mereka menentang penambangan ilegal di Desa Siumbatu yang dilakukan kedua perusahaan. Mereka menuduh kedua perusahaan menjual nikel dengan menggunakan dokumen terbang (dokumen sah milik perusahaan lain) dan menuntut Menteri ESDM mencabut IUP kedua perusahaan
12/1	Sekitar 100 warga desa Tamainusi, kecamatan Soyo Jaya, berdemonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Morowali Utara. Protes yang diwarnai aksi pembakaran sepeda motor ini menyoal keberadaan PT. Latanindo Mining yang merampas tanah warga. Mereka menuduh PT. Latanindo Mining tidak memiliki IUP.

Sumber: Database YTM

Kehadiran kegiatan-kegiatan penambangan dan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah memicu sengketa-sengketa dengan penduduk setempat. Sengketa-sengketa terutama lahir dari perampasan-



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

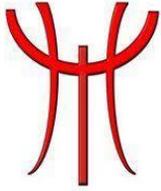
website : <http://www.ytm.or.id>

perampasan tanah tetapi juga karena efek-efek sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan penambangan dan pengolahan nikel. Sepanjang 2023, terjadi protes-protes warga desa di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara (lihat TABEL 2).

IV. REKOMENDASI-REKOMENDASI

:

- [1]. Pemerintah mesti memaksa perusahaan-perusahaan tambang nikel dan perusahaan-perusahaan pengolahan nikel memberlakukan standar K3 yang tinggi menuju *zero harm* di industri ini. Perusahaan-perusahaan diharuskan bekerja sama dengan para pekerja dan serikat-serikat buruh untuk melakukan analisa bahaya dan penilaian resiko di setiap divisi untuk memastikan bahaya-bahaya di tempat kerja dapat teridentifikasi dengan jelas dan memastikan standar kontrol resiko yang tinggi. Pemerintah harus memastikan bahwa tungku-tungku smelter tidak dibolehkan terus dioperasikan melampaui usia operasinya.
- [2] Pemerintah mesti melakukan moratorium penerbitan IUP nikel dengan tidak menerbitkan IUP baru untuk mencegah daya rusak lingkungan dan sosial yang lebih luas.
- [3] Pemerintah mesti melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal termasuk penindakan terhadap mafia jual beli BBM subsidi dalam pertambangan nikel dan memastikan proses penegakan hukum bebas dari *conflict of interest*. Pemerintah mesti membangun pusat pengendalian dan komando untuk pelacakan kasus-kasus penambangan ilegal dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jarak jauh secara *real-time*.
- [4] Pemerintah mesti melakukan moratorium pembangunan smelter nikel baru. Karena, pembangunan smelter tanpa kendali akan memicu penambangan bijih nikel yang meluas sehingga akan melipat-gandakan deforestasi, banjir, pencemaran air dan udara, sengketa-sengketa dengan penduduk setempat, dan memperpendek usia tambang karena percepatan deplesi.
- [5] Pemerintah harus memaksa pelaku industri smelter melakukan transisi dari PLTU batubara ke pembangkit-pembangkit listrik yang bersih dengan *timeline* terukur menuju *net zero emission* di industri ini. Pemerintah juga mesti tidak lagi mengeluarkan perizinan baru untuk pembangunan PLTU batubara baru.



YAYASAN TANAH MERDEKA

Jl. Tanjung Manimbaya III No.111 B Palu 94113, Sulawesi Tengah

Telp/Fax: (0451)-425 892

e-mail : ytm@ytm.or.id

website : <http://www.ytm.or.id>

- [6] Pemerintah mesti memaksa semua pelaku industri nikel untuk membangun industri turunan yang menghasilkan produk-produk turunan dari nikel olahan setengah jadi seperti *stainless steels*, nikel sulfate, katoda baterai, dst. Untuk itu pemerintah mesti membuat kebijakan tentang larangan ekspor produk-produk nikel setengah jadi (NPI, *ferronickel*, *nickel matte*, MHP) dengan mengharuskan pelaku industri mengolah lebih lanjut produk-produk tersebut di dalam negeri.

Palu, 30 Januari 2024

Richard Labiro
Direktur Eksekutif

Kontak:
Email: paluytm@gmail.com
HP: 085145879378